



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUCHLISIN Z.A
2. Jabatan : DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. NHK : 622636

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.627.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 297 m2/80 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 396 m2/200 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. Tanah Seluas 390 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
5. Tanah Seluas 1241.76 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah Seluas 791.34 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
7. Tanah Seluas 508 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HADIAH Rp. 30.000.000
8. Tanah Seluas 260 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 89.500.000

1. MOBIL, IZUSU PANTHER TOURING MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000



3. MOTOR, YAMAHA BEBEL Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	110.340.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.826.840.000
III. HUTANG	Rp.	230.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.596.840.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.